



Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap Karakter Siswa pada Mata Pelajaran PPKn Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Purwakarta

Very Sukma Firmansyah¹, Chika Gianistika²

¹STKIP Purwakarta, ²STIT Rakeyan Santang, Indonesia

E-mail: verysukmafirmsyah@gmail.com, cgianistika@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-05-07 Revised: 2024-06-27 Published: 2024-07-03 Keywords: <i>Anti-Corruption Education; Character; Civics.</i>	This research aims to analyze the influence of anti-corruption education on student character. This research method is meta-analysis with a sample of 10 articles in national journals and an instrument in the form of a coding sheet (coding category). Meta-analysis research shows that the influence of Anti-Corruption Education on the character of students at the elementary school education level in Purwakarta Regency, Anti-Corruption Education is more effectively used for students at the elementary school education level in the higher classes (phases B and C). Meanwhile, in terms of subject matter, Anti-Corruption Education has more influence on Pancasila material than other material. And from the subject of the media used, Anti-Corruption Education is more effective when used as a mind map. Other findings show that Anti-Corruption Education begins by providing problems related to the real world, students then actively formulate the problem and identify their knowledge, study and relate the material to the problem, and ultimately create a solution to the problem given. So that the character of courage in anti-corruption education will be formed. Anti-Corruption education has a high influence on the character of courage in elementary school students, especially in phases B and C.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-05-07 Direvisi: 2024-06-27 Dipublikasi: 2024-07-03 Kata kunci: <i>Pendidikan Anti Korupsi; Karakter; PPKn.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendidikan anti korupsi terhadap karakter siswa. Metode penelitian ini adalah meta-analisis dengan sampel sebanyak 10 artikel pada jurnal nasional dan instrumen berupa lembaran pemberian kode (coding category). Penelitian meta-analisis menunjukkan bahwa pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap karakter siswa dari subjek jenjang Pendidikan sekolah dasar di Kabupaten Purwakarta, Pendidikan Anti Korupsi lebih efektif digunakan pada peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar pada kelas tinggi (fase B dan C). Sementara itu dari subjek materi pelajaran, Pendidikan Anti Korupsi lebih berpengaruh pada materi Pancasila dari pada materi lainnya. Dan dari subjek media yang digunakan, Pendidikan Anti Korupsi lebih efektif bila memakai mind map. Temuan lain menunjukkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi dimulai dengan pemberian masalah yang terkait dengan dunia nyata, siswa kemudian secara aktif merumuskan masalah dan mengidentifikasi pengetahuannya, mempelajari dan mengaitkan materi dengan masalah, dan pada akhirnya membuat solusi dari masalah yang diberikan. Sehingga karakter keberanian pada Pendidikan anti korupsi akan terbentuk. Pendidikan Anti Korupsi memberikan pengaruh tinggi terhadap karakter keberanian pada diri siswa sekolah dasar terutama pada fase B dan C.

I. PENDAHULUAN

Nilai-nilai antikorupsi kepada siswa yang berada pada jenjang pendidikan belum disampaikan dengan memberikan contoh-contoh perilaku anti korupsi yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Hal ini disebabkan karena belum adanya sosialisasi yang menarik diantara siswa terkait perilaku yang mencerminkan antikorupsi. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya metode dan model pembelajaran yang lebih menarik perhatian siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang bisa menumbuhkan keaktifan siswa.

Transparency International Indonesia telah mengeluarkan indeks persepsi korupsi (IPK) pada Januari 2022. Pada indeks tersebut, posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Seperti yang ditunjukkan Suyatmiko sebagai Manajer Riset Transparency International Indonesia bahwa saat ini Indonesia memperoleh skor IPK 38 dan ranking 96 pada perolehan nilai tahun 2021. Ini meningkat dari perolehan tahun lalu yang skornya 37. Sementara untuk peringkat Asean, Indonesia berada pada peringkat kelima di bawah Vietnam yang memiliki skor IPK mencapai 39, Timor Leste dengan skor 41, Malaysia 48, dan Singapura 85.

Sedangkan untuk peringkat di negara G20, Indonesia berada di peringkat 16 di bawah Argentina yang skor CPI-nya sama. Adapun negara yang duduk di peringkat satu adalah Jerman dengan skor CPI 80 yang kemudian disusul Inggris 78, dan Kanada 74 (Suyatmiko, 2021).

Hal ini berbanding lurus dengan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). Bersumber dari (BPS, 2021) IPAK mengukur tingkat permisifitas masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Jika dilihat perkembangannya, IPAK cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2012 hingga tahun 2021. Mulai tahun 2019 IPAK terus meningkat dari 3,70 (tahun 2017), 3,84 (tahun 2020), hingga 3,88 (tahun 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021, sikap masyarakat cenderung lebih anti korupsi terhadap perilaku korupsi dibandingkan dengan tahun 2020.

Selain lembaga independen seperti Transparency International, selama bertahun-tahun, UNDP-ACIAC juga hadir untuk mengidentifikasi tren utama dalam strategi anti-korupsi nasional dan kesenjangan yang merusak keberhasilan dalam sebuah negara (Hunter, 2020). Organisasi ini menyebut korupsi sebagai sebuah penyalahgunaan kekuasaan, jabatan atau otoritas publik untuk keuntungan pribadi melalui penyuapan, pemerasan, penjajakan pengaruh, nepotisme, penipuan, uang cepat atau penggelapan (Reyes, 2010). Untuk memutus rantai tindak korupsi ini, UNDP telah mengembangkan berbagai metode dan pendekatan untuk membantu pemangku kepentingan nasional mengatasi kesenjangan tersebut, seringkali memanfaatkan nilai tambah dari platform regional yang telah dibuat dan diperkuat selama bertahun-tahun.

Salah satu metode untuk membantu mengatasi hal tersebut adalah dengan didirikan lembaga anti-korupsi sebagai sebuah strategi untuk mengatasi tindak korupsi. Namun lembaga ini membutuhkan tenaga kerja yang disiplin dan terlatih, banyak akal, fokus, dan dipandu oleh kode etik tertentu, yang dapat ditegakkan memastikan kepatuhan, kemanjuran, dan di atas semua akuntabilitas yang diperlukan untuk mengembangkan lembaga antikorupsi (Hoseah, 2014). Untuk memunculkan individu yang memiliki karakter baik seperti itu, maka bidang pendidikan saat ini mengupayakan pembiasaan karakter-karakter baik tersebut untuk diinternalisasi ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah. Hal ini dapat dilakukan karena Pendidikan antikorupsi dapat diakomodasi baik

dari aspek materi, metode pembelajaran, evaluasi dan sebagainya (Mukri, 2020). Sebuah penelitian menjelaskan bahwa pendidikan antikorupsi sangat penting bagi pelajar untuk mempertajam pemahaman tentang kejahatan korupsi (Dewantara, 2021). Hal ini menurut Handoyo dalam (Chadijah, 2024) dapat dilakukan melalui pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah dan tinggi.

Beberapa inovasi tentang internalisasi nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum pembelajaran di sekolah, lebih khususnya di jenjang Pendidikan sekolah bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal (Perdana, 2021). Dari segi formal penanganan korupsi dapat dilakukan melalui lembaga Pendidikan seperti sekolah. Untuk menerapkan ini adapun gagasan tentang model yang diterapkan dalam penanaman nilai antikorupsi meliputi; Model terintegrasi dalam mata pelajaran, model pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktifitas dan suasana sekolah model di Luar pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler dan model gabungan (Shobirin, 2014). Jika dalam segi informal, beberapa ide dari (Sari, 2021) menyebutkan proses penanaman nilai antikorupsi bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler berupa kegiatan pramuka, pencak silat dan PMR. Melalui ketiga ekstrakurikuler tersebut guru dapat menginternalisasikan nilai-nilai antikorupsi pada diri siswa. Selain itu, penerapan pendidikan anti korupsi harus melibatkan seluruh warga sekolah terutama orang tua siswa (Suyitno, 2021), karena lingkungan yang paling efektif dalam membiasakan kebiasaan baik untuk membentuk karakter yang baik adalah lingkungan rumah dengan didukung oleh lingkungan sekolah (Mukri, 2020).

Pandangan yang searah terkait tugas sekolah adalah untuk memperkuat nilai-nilai karakter positif (etos kerja, rasa hormat, tanggung jawab, kejujuran, dll) yang diajarkan di rumah (Lickona, 2013). Adapun Ganiere dikutip (Uswatiyah, 2023) bahwa cara pandang bahwa pendidikan dan pengembangan karakter mencakup tiga konstruksi, yaitu; (a) karakter harus diajarkan di rumah, (b) juga di sekolah, (c) oleh guru (termasuk orang tua dan pendidik formal) yang memberikan teladan dan memiliki karakter moral yang baik. Cole dalam (Mayasari, 2023) bahwa internalisasi karakter yang disisipkan dalam setiap proses pembelajaran di sekolah mengacu pada karakter yang tercantum dalam sila-sila Pancasila, sebagai pembeda dengan tujuan pencapaian karakter pada kurikulum terdahulu yang dinilai terlalu luas dan banyak

sehingga menimbulkan beban kompetensi afektif yang lebih banyak pada peserta didik. Pemikiran yang terkait nilai ialah sebagai pembeda seorang diri pribadi dengan orang lain, sedangkan nilai disebutkan sebagai istilah non-preskriptif lain yang tidak selalu menunjukkan asosiasi positif atau negatif. Dengan demikian, seseorang dapat disebut berkarakter baik ketika sudah mampu bersosialisasi dengan baik, mampu bertoleransi dengan segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat luas, tentang bagaimana sikapnya ketika terjadi perbedaan pendapat dan tentang cara mengelola emosi. Sejalan dengan itu, menurut Marshall dalam (Kartika, 2022) bahwa siswa lebih senang mendiskusikan masalah secara terbuka dan mengumpulkan tanggapan atas pemikiran dan pertanyaan dari teman sebaya tentang kejujuran dalam penilaian pribadi mereka sendiri tentang moral, nilai, dan etika. Dengan begitu dalam pengimplementasian ini, Pendidikan antikorupsi tidak fokus pada penyampaian pengetahuan guru, tetapi didahului melalui dialog, pertanyaan dan jawaban, dan diskusi antara guru dan siswa. Namun, waktu yang cukup untuk diskusi adalah kunci dalam metode seperti itu (Huang, 2021).

Berkowitz dikutip (Arifudin, 2022) menyatakan pendidikan karakter merupakan penciptaan lingkungan sekolah yang dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan etika dan tanggung jawab melalui implementasi model pembelajaran dan pengajaran nilai-nilai universal. Afeksi dari peserta didik dilatih dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan disiplin sikap di sekolah. Hal ini dilakukan tentunya dengan kerjasama seluruh warga sekolah agar tercipta iklim sekolah yang mengedepankan karakter baik peserta didik serta lingkungan belajar yang kondusif. Teori Berkowitz di atas juga diselaraskan oleh Pawelski sebagaimana dikutip (Hanafiah, 2022) bahwa karakter sebagai seperangkat karakteristik psikologis individu yang memengaruhi kemampuan dan kecenderungan orang tersebut. Dari psikologis ini dilihat bahwa pengaruh yang membawa kemampuan tersebut termasuk dalam psikologis positif. Implementasi pendidikan karakter pada kegiatan pembelajaran perlu dikembangkan sesuai dengan materi pelajaran yang disajikan secara eksplisit dan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Pengintegrasian dapat dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan kegiatan evaluasi pembelajaran. Kemudian Gunga menambahkan pada segi kurikulum etis juga harus menumbuhkan dalam diri siswanya

tidak hanya kemampuan untuk mengenali apa yang baik dan benar, tetapi disposisi untuk berpegang pada kebaikan itu dalam praktik (Gunga, 2013). Jika tidak ada kesinambungan, menurut Hadi dalam (Saepudin, 2021) maka akan lahir generasi dengan karakter hambar melahirkan perilaku koruptor.

Kedua segi ini jika ini dilakukan maka pendidikan karakter akan menjadi utuh dan tidak menjadi ilmu baru yang diajarkan secara terpisah. Tata cara pembelajaran dalam Pendidikan karakter ini dipaparkan Pietig dalam (Sinurat, 2022) bahwa program pendidikan karakter yang populer digambarkan sebagai menggunakan metode baik langsung atau tidak langsung dari instruksi moral. Hal ini juga dikemukakan Thomas Lickona bahwa Pendidikan karakter tidak bisa dipisahkan dari mata pelajaran yang lain (Lickona, 2013). Sehingga proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi secara efektif digunakan dengan cara pengembangan model pembudayaan dengan habituasi atau pembiasaan budaya sekolah yang aktif, kreatif, jujur dan menyenangkan dengan membiasakan karakter keberanian (courage) dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Kama Abdul Hakam dikutip (B. Arifin, 2024) menjelaskan sebuah proses internalisasi diterima atau tidaknya oleh orang lain bukan hanya ditentukan oleh muatan nilai, akan tetapi sering juga dipengaruhi oleh agen sipembawa atau sipenyampai informasi.

Pendidikan antikorupsi adalah tentang nilai dan pembentukan karakter, namun tidak semua nilai dapat diasosiasikan dengan nilai antikorupsi (Suyadi, 2021). Sehingga beberapa karakter disebutkan (Sarmini, 2017) sebagai materi yang mengandung nilai-nilai karakter pendidikan anti korupsi yaitu: (a) kejujuran, (b) kepedulian; (c) kemandirian, (d) disiplin, (e) akuntabilitas; (f) kerja keras; (g) kesederhanaan, (h) keberanian, dan (i) keadilan.

Saripudin dikutip (Ningsih, 2024) bahwa karakter tersebut kemudian diinternalisasi ke dalam pembelajaran di sekolah melalui berbagai model pembelajaran. Beberapa inovasi pada implementasi penanaman nilai anti korupsi di sekolah dapat dilaksanakan dengan enam pendekatan, yaitu melalui; (1) Problem-based learning; (2) Project-based learning or structured-task; (3) Work-based learning; (4) Service learning; (5) Cooperative learning; (6) Value learning, such as value clarification technique (value analysis, value list, value games).

Kama Abdul Hakam dalam (Hoerudin, 2023) menjelaskan bahwa dengan pendekatan ini diciptakan situasi dan kondisi serta penguatan yang memungkinkan siswa pada satuan pendidikannya. Di rumahnya, di lingkungan masyarakatnya membiasakan diri berperilaku sesuai dengan nilai dan menjadi karakter yang diinternalisasikan melalui proses intervensi. Saripudin dalam (Ulfah, 2022) bahwa pendekatan habituasi Pendidikan anti korupsi di sekolah merupakan proses akulturasi, pelebagaan dan penguatan nilai-nilai anti korupsi sesuai dengan iklim sekolah. Hal ini menurut Budimansyah dalam (A. Arifin, 2024) bahwa pembiasaan adalah proses penciptaan berbagai situasi dan kondisi (persistent-lifesituation). Situasi dan kondisi tersebut mengandung berbagai penguatan, yang memungkinkan peserta didik di satuan pendidikan, rumah dan masyarakatnya, untuk berperilaku nilai yang sesuai dan menjadikan nilai tersebut terinternalisasi dan personalisasi sebagai karakter atau fitrah. Dengan proses pembiasaan, siswa cenderung melakukan tindakan atau perbuatan yang relatif tetap dan otomatis sehingga sikap dan tindakan tersebut cenderung stabil. Sikap atau perilaku yang menjadi kebiasaan memiliki beberapa ciri. Diantaranya adalah (a) perilaku yang relatif menetap; (b) pembiasaan umumnya tidak memerlukan fungsi berpikir yang cukup tinggi, misalnya: sapaan dapat dipikirkan atau ditiru; (c) Kebiasaan tersebut bukan merupakan hasil dari proses pendewasaan, tetapi sebagai hasil dari pengalaman atau pembelajaran; (d) perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang sebagai respons terhadap stimulus yang sama.

Implementasi internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pembiasaan didasarkan pada teori behavioristik dari Thorndike, Watson, Clark Hull, Guthrie dan Skinner (Schunk, 2012). Teori tersebut menyatakan bahwa proses belajar lebih menekankan pada stimulus dan respon yang muncul dari diri siswa. Dalam model ini, kualitas manusia diamati dari aspek kinerja/perilaku yang dapat dilihat secara empiris (nyata). Pola stimulus dan respon mencakup beberapa hal. Stimulus tersebut meliputi proses pembiasaan dan pengulangan perilaku secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Respon meliputi penguatan dengan menggunakan sistem reward and punishment melalui penambahan poin untuk pencapaian dan pengurangan poin untuk pelanggaran. Integrasi pendidikan anti korupsi dalam pembiasaan melalui sistem ini akan memberikan penguatan untuk tetap

melakukan pola perilaku yang diharapkan dan mengurangi pola perilaku yang dilarang.

Jika nilai-nilai anti korupsi ini dapat dijalankan dengan penerapan model pembelajaran yang berdasarkan pada pembiasaan karakter baik, sekolah mampu melahirkan output yang tidak hanya terampil dalam segi kognitif, tetapi juga afektifnya. Sebab sesungguhnya antikorupsi mengacu pada mendorong kesadaran nasional antikorupsi melalui pendidikan dan promosi agar masyarakat menyadari kejahatan korupsi dan mengimbau warga secara kolaboratif untuk memberantas korupsi dan membentuk jaringan pencegahan korupsi yang lengkap (Huang, 2021).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode meta analisis. Menurut (Kartika, 2023) bahwa metode penelitian adalah sebuah upaya dalam mencari dan mengumpulkan data atau informasi penelitian yang digunakan oleh peneliti. Menurut Heri, dkk dikutip (Arifudin, 2024) bahwa meta analisis merupakan model penelitian kuantitatif dengan cara menganalisis data kuantitatif dari hasil penelitian sebelumnya untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan dalam penelitian-penelitian tersebut.

Sejauh ini penggunaan meta-analisis yang paling umum adalah ulasan literatur kuantitatif. Ini adalah artikel ulasan di mana penulis memilih temuan penelitian atau efek yang telah diselidiki dalam penelitian utama di bawah sejumlah besar keadaan yang berbeda. Menurut (Kartika, 2024) bahwa meta analisis digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi tujuan penelitian.

Adapun menurut Henny dalam (Arifudin, 2023) bahwa tujuan dari penelitian meta analisis adalah sebagai berikut: 1) Untuk menemukan effect size, yaitu kekuatan hubungan ataupun besarnya jumlah perbedaan antar variable, 2) Menyimpulkan data sample ke populasi dengan menggunakan uji hipotesis (nilai p) ataupun perkiraan, serta 3) Melakukan pengawasan terhadap variable yang akan berpotensi sebagai faktor perancu agar tidak mengganggu kemaknaan statistik dari hasil hubungan atau pembeda.

Penelitian ini menggunakan metode meta-analisis dengan mengkaji beberapa artikel pada jurnal nasional. Meta-analisis bersifat kuantitatif karena menggunakan penghitungan angka-angka dan statistik untuk kepentingan praktis, yaitu untuk menyusun dan mengekstraksi informasi dari begitu banyak data yang tak mungkin dilakukan dengan metode lain. Penelitian meta-

analisis ini menggunakan sampel 10 artikel pada jurnal nasional tentang Pendidikan anti korupsi. Distribusi 10 artikel subjek penelitian dapat dilihat pada kelompok-kelompok di tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi 10 artikel subjek penelitian

Keterangan	Jenjang Pendidikan	Materi Pelajaran	Media
SD Fase B (kelas 3 dan 4)	6		
SD Fase C (kelas 5 dan 6)	4		
Pancasila		4	
Hak dan Kewajiban		3	
Keragaman Budaya		3	
Multi media			1
Buku Bergambar			2
Buku Ajar			2
Mind Map			1
Non Media			4
Jumlah	10	10	10

Pengkodean (coding) dalam meta-analisis merupakan syarat paling penting untuk dapat mempermudah pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu instrumen dalam meta-analisis ini dilakukan dengan lembaran pemberian kode (coding category). Untuk maksud tersebut, variabel-variabel yang dipakai untuk pemberian kode dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menghitung besar pengaruh pembelajaran Pendidikan anti korupsi dalam mata pelajaran PPKn adalah Nama peneliti dan tahun penelitian, Judul Penelitian, Jenjang pendidikan subyek Penelitian, Materi yang digunakan dalam penelitian, Jenis media yang dipakai, dan Variabel terikat Penelitian.

Langkah-langkah tabulasi data adalah (1) identifikasi variabel-variabel penelitian. Yang setelah ditemukan, dimasukkan dalam kolom variabel yang sesuai, (2) identifikasi rerata dan deviasi standar dari data kelompok eksperimen maupun kelompok control untuk setiap subjek/subpenelitian, (3) penghitungan effect size dengan menggunakan rumus Glass dikutip (Ropitasari, 2023) berdasarkan rerata dan deviasi standar tersebut, yaitu dengan mencari besarnya effect size (Δ) dengan jalan membagi selisih rerata kelompok eksperimen (XE) dengan rerata kelompok kontrol (XK), dengan deviasi standar kelompok kontrol (SK). Rumusnya adalah: $\Delta = \frac{\bar{x}_{eksperimen} - \bar{x}_{kontrol}}{SD_{kontrol}}$ dengan kriteria ukuran efek (Glass, 1981) sebagai berikut:

1. effect size $\leq 0,15$ efek yang dapat diabaikan
2. $0,15 < \text{effect size} \leq 0,40$ efek kecil
3. $0,40 < \text{effect size} \leq 0,75$ efek sedang
4. $0,75 < \text{effect size} \leq 1,10$ efek tinggi
5. $1,10 < \text{effect size} \leq 1,45$ efek yang sangat tinggi

6. $1,45 < \text{effect size}$ pengaruh yang tinggi

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian dari 10 artikel dari penelitian ini diperoleh effect size sebagai berikut:

1. Besar Pengaruh penerapan Pendidikan anti korupsi berdasarkan fase perkembangan

Tabel 2. Sebaran pengaruh penerapan Pendidikan Anti Korupsi

No	Jenjang Pendidikan	$\bar{\Delta}$
1.	SD Fase B (kelas 3 dan 4)	0,94
2.	SD Fase C (kelas 5 dan 6)	0,24

Hasil meta-analisis pengaruh penerapan Pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran PPKn berdasarkan fase pada jenjang Pendidikan dasar, ditemukan bahwa Pendidikan Anti Korupsi memberikan pengaruh positif yang tinggi terhadap peserta didik pada siswa di fase B(kelas 3 dan 4). Sedangkan pada siswa di fase C (kelas 5 dan 6), Pendidikan Anti Korupsi memberikan pengaruh sangat rendah terhadap sikap dan karakter siswa pada mata pelajaran PPKn. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi lebih efektif jika digunakan pada pembelajaran PPKn di fase B jenjang Pendidikan sekolah dasar.

2. Besar Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi Berdasarkan Materi Pelajaran

Tabel 3. Sebaran besar pengaruh Pendidikan Anti Korupsi berdasarkan materi pelajaran

No.	Materi Pelajaran	$\bar{\Delta}$
1.	Pancasila	0,96
2.	Hak dan Kewajiban	0,56
3.	Keragaman Budaya	0,24

Berdasarkan materi pelajaran, hasil meta-analisis menunjukkan bahwa pengaruh tertinggi Pendidikan Anti Korupsi terhadap karakter terdapat pada materi Pancasila. Pendidikan Anti Korupsi juga memberikan pengaruh positif tinggi pada materi hak dan kewajiban. Sedangkan pada materi keragaman budaya, Pendidikan Anti Korupsi memberikan pengaruh yang rendah.

3. Besar Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi Berdasarkan Media yang digunakan

Tabel 4. Sebaran besar pengaruh Pendidikan Anti Korupsi berdasarkan media ajar

No.	Media	$\bar{\Delta}$
1.	Multimedia	0,63
2.	Buku Bergambar	0,74
3.	Mind Map	1,09
4.	NonMedia	1,02

Hasil meta-analisis pengaruh Pendidikan anti korupsi terhadap karakter siswa pada mata pelajaran PPKn berdasarkan media yang digunakan, ditemukan bahwa pengaruh Pendidikan anti korupsi tertinggi terdapat pada media Mind Map. Namun pada media lain, seperti pada multimedia, buku bergambar serta non media, Pendidikan anti korupsi juga memberikan pengaruh positif.

4. Besar Pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap karakter siswa pada mata pelajaran PPKn

Tabel 5. Sebaran besar pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap karakter

No	Karakter	$\bar{\Delta}$
1.	Kemandirian	0,42
2.	Kepedulian	0,28
3.	Kejujuran	0,51
4.	Keberanian	0,95

Berdasarkan karakter siswa, Pendidikan Anti Korupsi memberikan pengaruh positif tertinggi pada karakter keberanian. Pendidikan Anti Korupsi juga memberikan pengaruh Positif pada karakter kejujuran dan kemandirian. Sedangkan pada karakter kepedulian, Pendidikan anti korupsi memberikan pengaruh sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa Pendidikan Anti Korupsi lebih efektif untuk membiasakan karakter keberanian siswa.

Secara keseluruhan, Pendidikan Anti Korupsi hampir memberikan efek positif terhadap karakter siswa. Dari subjek perbedaan jenjang pendidikan di mana Pendidikan Anti Korupsi digunakan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pendidikan Anti Korupsi lebih efektif pada siswa di Fase B (kelas 3 dan 4) dibandingkan dengan siswa pada Fase C (kelas 5 dan 6). Menurut teori Piaget dalam (Ulfah, 2021), perkembangan kognitif siswa sekolah dasar, usia antara 9-11 tahun belum mampu berpikir abstrak dan logis namun berpikir secara konkret dan kontekstual hal ini berarti bahwa Pendidikan

Anti Korupsi dapat diterapkan pada siswa di fase B dan C. Namun hasil meta-analisis menunjukkan bahwa penerapan Pendidikan Anti Korupsi lebih efektif pada siswa Fase B (kelas 3 dan 4). Hal ini dikarenakan beban belajar siswa pada Fase C lebih tinggi dari siswa Fase B, sehingga pengaruh Pendidikan Anti Korupsi terhadap karakter siswa pada fase B lebih tinggi dari siswa pada fase C.

Dari subjek materi pembelajaran, Pendidikan Anti Korupsi memberikan efek positif tertinggi pada materi pembelajaran Pancasila, namun memberikan efek rendah pada materi Keberagaman Budaya, hal ini dikarenakan Pancasila sangat mudah bila dikaitkan dalam permasalahan di kehidupan nyata, berbeda dengan materi lainnya yang penerapannya sangat sulit bila dikaitkan dengan permasalahan nyata, dengan demikian pada materi Pancasila, keterampilan peserta didik dengan mudah dikembangkan.

Sementara itu, dari aspek pemilihan media dalam pembelajaran ternyata media mind map berpengaruh lebih besar dari pada media lain, yang berarti bahwa mind map sangat efektif untuk meningkatkan keterampilan logis matematis siswa. Bagi guru fungsi mind map adalah untuk menentukan peserta didik dapat belajar maju sesuai dengan kecepatan masing-masing dan materi pelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan siswa, baik cepat maupun yang lambat membaca dan memahami.

Dan dari karakter siswa, Pendidikan Anti Korupsi memberikan efek positif tertinggi pada karakter keberanian. Hal ini merupakan hal yang logis, sebab dalam pembelajarannya, Pendidikan Anti Korupsi dimulai dengan pemberian masalah yang terkait dengan dunia nyata, siswa kemudian secara aktif merumuskan masalah dan mengidentifikasi pengetahuannya, mempelajari dan mengaitkan materi dengan masalah, dan pada akhirnya membuat solusi dari masalah yang diberikan. Sehingga karakter keberanian pada Pendidikan Anti Korupsi akan terbentuk.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari hasil meta-analisis pada penelitian ini disimpulkan bahwa penggunaan Pendidikan Anti Korupsi sangat berpengaruh bila Pendidikan Anti Korupsi digunakan pada siswa Fase B (kelas 3 dan 4) disbanding dengan siswa pada Fase C (kelas 5 dan 6), sementara itu dari subjek materi pelajaran Pendidikan Anti Korupsi lebih berpengaruh pada materi Pancasila, hal ini dikarenakan

materi Pancasila sangat mudah bila dikaitkan dalam permasalahan di kehidupan sehari-hari sehingga keterampilan siswa dalam mengeksplorasi pengetahuannya akan dengan mudah dikembangkan. Dan dari subjek media yang di gunakan, Pendidikan Anti Korupsi lebih efektif bila didampingi dengan media mind map, karena fungsi dari mind map adalah untuk menentukan siswa dapat belajar maju sesuai dengan kecepatan masing-masing dan materi pelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga mampu memenuhi kebutuhan siswa, baik cepat maupun yang lambat membaca dan memahami. Dari aspek karakter siswa, Pendidikan Anti Korupsi memberikan efek positif tertinggi pada karakter keberanian. Hal ini merupakan hal yang logis, sebab dalam pembelajarannya, Pendidikan Anti Korupsi dimulai dengan pemberian masalah yang terkait dengan dunia nyata, siswa kemudian secara aktif merumuskan masalah dan mengidentifikasi pengetahuan mereka, mempelajari dan mengaitkan materi dengan masalah, dan pada akhirnya membuat solusi dari masalah yang diberikan. Sehingga karakter keberanian pada Pendidikan anti korupsi akan terbentuk.

B. Saran

Berdasar kajian yang telah ada, ke depan bisa melakukan penelitian lanjutan lebih komprehensif.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, A. (2024). The Relationship Between Classroom Environment, Teacher Professional Development, and Student Academic Performance in Secondary Education. *International Education Trend Issues*, 2(2), 151–159.
- Arifin, B. (2024). Integrasi Penguatan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Pada Peserta Didik Sekolah Dasar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13547–13555.
- Arifudin, O. (2022). Optimalisasi Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Membina Karakter Peserta Didik. *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 829–837.
- Arifudin, O. (2023). Pendampingan Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Dalam Submit Jurnal Ilmiah Pada Open Journal System. *Jurnal Bakti Tahsinia*, 1(1), 50–58.
- Arifudin, O. (2024). Utilization of artificial intelligence in scientific writing. *Journal of Technology Global*, 1(2), 131–140.
- BPS. (2021). *Indeks Perilaku Anti Korupsi 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Chadijah, S. (2023). A Correlational Study of Gadget Used Towards Reading Interest. *Journal of English Culture, Language, Literature and Education*, 11(1), 59–78.
- Chadijah, S. (2024). Trends In The Development Of Artificial Intelligence-Based Technology In Education. *Injotel*, 2(6), 1722-1733.
- Dewantara, J. A. (2021). Anti-corruption education as an effort to form students with character humanist and law compliant. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 18(1), 70–81.
- Gunga. (2013). The Role of Anti-Corruption Education in the Light of Aristotelian Concept of Akrasia: An Epistemic Inquiry into the Anti-corruption Initiatives in Kenya. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 4(4), 353–368.
- Hanafiah, H. (2022). Implementation Of Character Strengthening In Boarding School Students. *International Journal of Education and Digital Learning (IJEDL)*, 1(2), 49–54.
- Hoerudin, C. W. (2023). E-Learning as A Learning Media Innovation Islamic Education. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(1), 579–594.
- Hoseah, E. G. (2014). Corruption as a global hindrance to promoting ethics, integrity, and sustainable development in Tanzania: the role of the anti-corruption agency. *Journal of Global Ethics*, 10(3), 384– 392.
- Huang, C. H. (2021). Effect Of Applying Case Method To Anti-Corruption Education On Learning Motivation And Learning Effectiveness. *Revista de Cercetare Şi Intervenție Socială*, 73, 276–287.
- Hunter, M. (2020). Anti-corruption, Transparency and Accountability: Case Study of Healthcare in the Arab Countries. *Global Health Action*, 13, 1–11.
- Kartika, I. (2022). The Effect of Improving Spiritual Quotient and Emotional Quotient

- on Mental Health in Sya'ban Month at The Pandemic Covid 19 in Jakarta. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 35-49.
- Kartika, I. (2023). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 4(2), 147-160.
- Kartika, I. (2024). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (Pai) Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa Di Sekolah Dasar. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 5(2), 171-187.
- Lickona. (2013). *Pendidikan Karakter (Panduan Lengkap Mendidik siswa menjadi Pintar dan Baik)*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Mayasari, A. (2023). Penerapan Model Pembelajaran Nilai Melalui Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Karakter Siswa. *Antologi Kajian Multidisiplin Ilmu (Al-Kamil)*, 1(1), 47-59.
- Mukri, S. G. (2020). The Anti-Corruption Education on the Basis of Religion and National Culture. *JURNAL CITA HUKUM (Indonesian Law Journal)*, 8(2), 399-414.
- Ningsih, I. W. (2024). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Peserta Didik Di Sekolah Dasar. *Jurnal Tahsinia*, 5(1), 23-37.
- Perdana, D. R. (2021). Model Dan Strategi Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 8(1), 21-30.
- Reyes, V. C. (2010). The Philippine Department of Education: challenges of policy implementation amidst corruption. *Asia Pacific Journal of Education*, 30, 381-400.
- Ropitasari, A. (2023). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dalam Mewujudkan Karakter Religius Pada Peserta Didik. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 12, 1-14.
- Saepudin, S. (2021). Improving the Ability to Understand the Quran Reading through the Application of the Mind Map Method during the Covid 19 Pandemic in Al-Qur'an Education Institutions Qurrota A'yun at Kutaraja Village, Maleber District, Kuningan Regency. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 14331-14338.
- Sari, V. K. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Antikorupsi melalui Ekstrakurikuler dan Pembiasaan di Sekolah Dasar. *JURNAL BASICEDU*, 5(4), 2106-2115.
- Schunk. (2012). *Learning theories: An educational perspective*. New York: Pearson Education.
- Shobirin. (2014). Model Penanaman Nilai Antikorupsi Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.*, 1(2), 107-117.
- Sinurat, J. (2022). *Pengembangan Moral & Keagamaan Anak Usia Dini*. Bandung: CV Widina Media Utama.
- Suyadi. (2021). The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 10(4), 1417-1425.
- Suyatmiko. (2021). Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161-178.
- Suyitno. (2021). Integrasi Nilai-Nilai Keislaman dalam Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah Dasar Muhammadiyah Se-Kapanewon Depok Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 1(1), 37-42.
- Ulfah, U. (2021). Pengaruh Aspek Kognitif, Afektif, Dan Psikomotor Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen Dan Pendidikan*, 2(1), 1-9.
- Ulfah, U. (2022). Kepemimpinan Pendidikan di Era Disrupsi. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 153-161.
- Uswatiyah, W. (2023). Instilling religious character values in elementary school students through Islamic religious

education learning. *JUPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 9(9), 100–107.